

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagari merupakan satuan wilayah administratif yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat. Nagari berperan sebagai kesatuan masyarakat adat yang memiliki struktur hukum tersendiri, diakui sebagai pelaksana pemerintahan yang berlandaskan adat istiadat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹ Nagari digunakan sebagai sebutan khas yang memiliki kedudukan setara dengan desa atau kelurahan. Dari segi pengaturan antara nagari dan desa tidak memiliki perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada penamaannya. Nagari atau desa memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kelurahan atau wilayah lainnya, karena nagari menjalankan pemerintahan yang bersifat otonom dan memiliki otonomi asli.

Pemerintah Indonesia menjadikan pembangunan nagari atau desa sebagai strategi utama dalam menangani beragam masalah sosial di tingkat lokal, seperti keterbelakangan dan kemiskinan, guna mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pendekatan partisipatif, peran serta masyarakat menjadi unsur penting yang senantiasa diupayakan dalam berbagai tahapan kegiatan. Keterlibatan ini berperan penting dalam pemerataan pembangunan di nagari, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan nagari sejatinya berlandaskan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kesadaran tersebut akan

¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

memperkuat rasa kepemilikan serta tanggung jawab masyarakat terhadap proses pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi aktif ini, disertai pembinaan dari pemerintah daerah, diharapkan mampu mendorong kemajuan nagari secara berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi perkembangan wilayah tersebut.²

Pembangunan yang berbasis partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan pribadi maupun kelompoknya, yang kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan di nagari telah tercapai.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur dan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan desa juga harus dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong demi terciptanya keadilan sosial.³ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pembangunan nagari atau desa tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada kontribusi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

² Tarsim And Erga Yuhandra, "Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018): 10–23.

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Fokus utama dari pembangunan nagari adalah mendorong kesejahteraan masyarakat, yang berarti masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk diberikan ruang dalam merancang dan mengusulkan proyek pembangunan, khususnya dalam menetapkan prioritas proyek yang paling dibutuhkan oleh nagari. Dengan demikian, pembangunan benar-benar berasal dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat. Partisipasi ini idealnya tumbuh dari bawah sebagai wujud kesadaran serta tanggung jawab kolektif warga terhadap kemajuan nagari mereka.

Pelaksanaan pembangunan nagari pada prinsipnya merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan secara baik dan terorganisir agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Efektivitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴ Efektivitas pembangunan di tingkat nagari sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif warga setempat. Ketika masyarakat turut serta dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan serta potensi wilayahnya. Hal ini menjadikan hasil pembangunan lebih relevan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadi kewenangan pemerintah

⁴ S. Herlina Martauli, Dedi Apriansah Andri, And Tati Juriani Kamaludin, "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan

desa yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat secara gotong royong. Selain itu, Pasal 82 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan, dimana hasil pemantauan, termasuk kritik dan masukan, dapat disampaikan kepada pemerintah desa maupun BPD sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Karena desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, maka pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Dengan demikian, desa menjadi elemen penting dalam sistem pembangunan nasional Indonesia.

Menurut Steers, efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Martani Huseini, yang menekankan bahwa ukuran efektivitas suatu organisasi terletak pada sejauh mana tujuan dan sarannya dapat dicapai secara optimal. Tujuan dipahami sebagai kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan, sementara sasaran merupakan bentuk tujuan antara yang lebih bersifat operasional. Dalam konteks ini, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang mencakup keseluruhan organisasi maupun bagian tertentu di dalamnya.⁵ Starman menyatakan bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya kegiatan yang bermutu, tepat sasaran dan tepat waktu dengan mengaktifkan secara efektif faktor

⁵ Helena Afriani Rama And Esa Wahyu Endarti, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid19," *Jurnal Inovasi Sektor Publik* Vol 2, No 3 (2022): 13–24.

pendukung berupa partisipasi masyarakat.⁶ Menurut Sondang P. Siagian efektivitas berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan terselesaikan dalam rentang waktu yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan suatu tugas dapat dikatakan baik atau tidak tergantung pada bagaimana cara tugas tersebut dijalankan serta seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, efektivitas memiliki hubungan yang kuat dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok, keberhasilan dalam mencapai tujuan, ketepatan dalam waktu pelaksanaan, serta partisipasi aktif dari seluruh anggota yang terlibat. Efektivitas juga mencerminkan sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil yang berhasil dicapai.

Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan pembangunan yaitu penelitian dari Rahmawati, Ansyari Mone, dan Nuryanti Mustari⁷, Ono Taryono dan Fandi Ahmad⁸, Ribka Labogia Joorie Marhaen Ruru, dan Novva Plangiten⁹; Ogidius dan

⁶ Ribka Lombogia, Joorie Marhaen Ruru, And Novva Plangiten, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder," *Jurnal Administrasi Publik* 4, No. 50 (2018)

⁷ Rahmawati Rahmawati, Ansyari Mone, and Nuryanti Mustari, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program novasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, No. 2 (2021): 590–604.

⁸ Fandi Ahmad and Ono Taryono, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu," *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 24, No. 2 (2021).

⁹ Ribka Lombogia, Joorie Marhaen Ruru, dan Novva Plangiten. *Op.Cit.*, Hlm 1-13.

Sugeng¹⁰. Sejalan dengan pandangan Conyers, terdapat tiga alasan utama yang menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangatlah penting: 1. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang kondisi atau pandangan masyarakat setempat. Tanpa keterlibatan masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek yang dijalankan berpotensi mengalami kegagalan. 2. Masyarakat cenderung lebih percaya pada proyek atau program pembangunan jika mereka terlibat dalam tahap persiapan dan perencanaan, karena hal ini memungkinkan mereka untuk memahami dengan lebih baik detail proyek tersebut. 3. Muncul pandangan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah bagian dari hak demokrasi.¹¹

Peningkatan infrastruktur pertanian menjadi salah satu program pembangunan melalui anggaran dana nagari di Nagari Binjai. Infrastruktur pertanian menjadi kebutuhan utama masyarakat Nagari Binjai dalam meningkatkan perekonomian, karena mayoritas masyarakat bertani dan berkebun. Salah satu program yang tengah diupayakan oleh pemerintah Nagari Binjai adalah peningkatan infrastruktur pertanian berupa jalan pertanian di Nagari Binjai. Dengan adanya pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat mempermudah petani dalam mengangkut hasil panennya dari kebun ke rumah petani dan dengan adanya jalan pertanian ini akan memutus biaya produksi yang besar.

¹⁰ Ogidius Dan Sugeng. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Tempatpengelolaan Sampah Terpadu Studi Di Desa Tulungreo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Vol 8 No 2, Hlm. 109-114.

¹¹ Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 4 No 2, Hlm.302.

Penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk memetakan arah dan posisi kebaruan yang ingin dihadirkan dalam penelitian ini. Pertama penelitian dari Ribka Lombogia, Joorie M. Ruru, dan Novva N. Plangiten dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan di Desa Timbukar Kecamatan Sonder ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pembangunan yang dilaksanakan di Desa Timbukar.¹²

Kedua penelitian dari Emelyati dan M.N Romi AS berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa di Desa Teraju Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Teraju Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan teknik purposive sampling, data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan regresi sederhana, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk partisipasi masyarakat seperti dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

¹² Ribka Lombogia, Joorie Marhaen Ruru, Dan Novva Plangiten, *Op.Cit*, Hlm. 1-13.

Penelitian yang dilakukan oleh Christiani Devid, Billi Sondakh, Maje S. Pangkey, dan Burhanuddin Kiyai membahas pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Dua, Kecamatan Kawangkoan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan teknik pengambilan sampel secara accidental sampling, melibatkan 71 responden. Analisis data dilakukan melalui metode regresi dan korelasi sederhana.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi sebelumnya yang sama-sama meneliti pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus, variabel yang digunakan, dan lokasi penelitian. Variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Yadav, yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Konsep ini menekankan bahwa partisipasi bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan evaluatif dalam proses pembangunan. Sementara itu, variabel efektivitas pembangunan mengacu pada teori M. Steers yang terdiri atas tiga indikator utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur pertanian, dengan objek khusus berupa jalan pertanian. Berdasarkan kajian teoritis

dan pengalaman empiris di lapangan, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan diyakini memiliki kontribusi signifikan terhadap efektivitas serta keberlanjutan hasil pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan infrastruktur jalan pertanian di Nagari Binjai tahun 2022-2023.

Lokasi penelitian dipilih di Nagari Binjai, Kecamatan Tigou Nagari, Kabupaten Pasaman, karena wilayah ini belum pernah menjadi objek penelitian sebelumnya terkait pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan pertanian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengisi kekosongan data dan informasi ilmiah mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, Nagari Binjai merupakan wilayah dengan potensi pertanian yang cukup besar, sehingga penting untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pemilihan wali nagari dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses pembangunan di tingkat nagari.

Keterlibatan aktif masyarakat secara inklusif dan partisipasi mereka dalam setiap tahap pembangunan nagari sangatlah penting untuk menjamin keberhasilan

pembangunan yang terarah dan terencana dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat nagari, sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan kenagarian dapat mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat dan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Keterlibatan mengacu pada pemberian kesempatan bagi setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, petani, nelayan, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nagari dapat dianalisis melalui berbagai tahapan, yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi terhadap proses yang telah dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari proses pembuatan keputusan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, aspirasi mereka dapat lebih terakomodasi, sehingga kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah nagari menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sehingga proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite nagari yaitu Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Pengurus Jorong maupun Pemuka masyarakat, melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain. Dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, hal ini dapat mengubah pola perencanaan dari yang awalnya bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*.¹³

¹³ *Top-Down Planning* adalah model pembangunan yang menekankan peran pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan masyarakat hanya berfungsi sebagai objek. Model ini memiliki keuntungan dalam hal keberhasilan tahapan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana. Namun, hasil

Nagari Binjai merupakan nagari yang berada di wilayah Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Nagari ini merupakan nagari dengan mata pencarian penduduknya mayoritas petani sawah, petani sawit, buruh tani, dan buruh pabrik. Penduduk nagari Binjai yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani sebanyak 74% dari total penduduk yang bekerja.¹⁴

Pada tahun 2022-2023 pemerintahan Nagari Binjai memprioritaskan pengembangan infrastruktur fisik sebagai penunjang utama dalam sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian yang telah dilaksanakan Nagari Binjai tahun 2022, yakni Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas Simpang Empat, Jalan Usaha Tani Lambah Bateh dan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Lubuak Pandan.¹⁵

Tabel 1.1
Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Nagari Binjai
Tahun 2022

No	Kegiatan Pembangunan Pada Tahun 2022
1	Peningkatan Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas Simpang Empat Manggopoh
2	Peningkatan Jalan Usaha Tani Lambah Bateh
3	Rabat Beton Jalan Usaha Tani Lubuak Pandan

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2023

pembangunan tidak selalu diterima oleh masyarakat, terutama jika tidak sesuai dengan budaya atau nilai-nilai yang ada. Hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap hasil pembangunan, menjadikannya sia-sia. Sebaliknya, *Bottom-Up Planning* adalah kebalikan dari model *Top Down*. Model ini memiliki keunggulan karena melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga rencana pemerintah bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa hasil pembangunan akan diterima dengan baik, karena berasal dari usulan masyarakat itu sendiri. Model ini juga mengubah pandangan terhadap masyarakat, yang sebelumnya dianggap sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang aktif dalam proses pembangunan. (Dilihat Dari A Syafril, 2003. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses erencanaan Pembangunan Di Kota Binjai". *Tesis*, Universitas Medan Area).

¹⁴ Mata Pencarian Penduduk Nagari Binjai yang Berprofesi Sebagai Petani, Diakses melalui <https://Kampungkb.Bkkbn.Go.Id/Kampung/18387/Kampung-Keluarga-Berkualitas-Nagari-Binjai>

¹⁵ Dokumen internal Kantor Wali Nagari Binjai tahun 2023, disampaikan oleh Muammad Dion, Kaur Perencanaan.

Gambar 1.1
Pembangunan Jembatan Jalan Kampuang Pili



Sumber: *Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024*

Gambar 1.2
Rabat Beton Jalan Usaha Tani Lubuak Pandan



Sumber: *Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024*

Gambar 1.3
Peningkatan Jalan Usaha Tani Lambah Bateh



Sumber: *Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024*
Kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian yang telah dilaksanakan tahun 2023, yakni Peningkatan Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas Simpang Empat dan Pembangunan Jembatan Gantung Lubuak Pandan.

Tabel 1.2
Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Nagari Binjai Tahun 2023

No	Kegiatan Pembangunan Pada Tahun 2023
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas Simpang Empat Manggopoh
2	Pembangunan Jembatan Gantung Lubuak Pandan

Sumber: *Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024*

Gambar 1.4
Pembangunan Jembatan Gantung Lubuak Pandan



Sumber: *Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024*

Pada penelitian awal yang peneliti lakukan dengan Kaur Perencanaan Nagari Binjai mengatakan “partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari Binjai Aktif, salah satu bukti aktif yaitu pada tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam menghadiri undangan Musrenbang, serta berperan aktif dalam mengusulkan skala prioritas kegiatan yang akan dibangun”.¹⁶

Gambar 1.5
Daftar Hadir Musrenbang Nagari Binjai Tahun 2021

NO	NAMA	JENIS KELAHIAN	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Rika Subrina	P	Koruk Bawang	pd. karah	
2					
3	Amur	P	PERKORAD	Bay. samud	
4	Muband	L	IPM	pd. karah	
5	Misri Eftiani	P	Sembayang	Binjai	
6	MU ELIAS	P	IPM	pd. karah	
7	MURDANUS	L	KORAD	Binjai	
8	Yoni Septian	P	KPM	pd. karah	
9	Hani Fita Nanda	L	BAMUS	pd. karah	
10	Musliman	L	IPM	pd. karah	
11	Juni Duna	L	BAMUS	Binjai	
12	Muhammad Aini	L	IPM	Binjai	
13	Sulhannaim	L	Kajorong	pd. karah	
14	Zaki Wahid	L	Korad	Binjai	
15	HAAP TERE	L	BAMUS	pd. karah	
16	DOPE MET	P	STAF	pd. karah	
17	MURINI	P	STAF	pd. karah	
18	SISKA YULIA	P	STAF	Binjai	
19	Masman	P	Korad	Binjai	
20	TURMARIUS	P	BAMUS	pd. karah	
21	Nida Nida	P	Sembayang	Binjai	
22	Ali Binjai	L	IPM	Binjai	
23	HENDI	L	BAMUS	pd. karah	
24	ADAM WAKA	P	KPM	pd. karah	
25	MURDANI	P	BAMUS	Binjai	
26	Corah At. Sungs	L	IPM	Binjai	
27	SULLAEBI	L	IPM	Binjai	
28	UMMAH	L	IPM	Binjai	
29	Bahar H. Sungs	L	IPM	Binjai	
30	Syamsudin	L	IPM	Binjai	
31	YUSMAN	L	IPM	Binjai	
32	Sulhannaim	L	IPM	Binjai	
33	ARIP	L	IPM	Binjai	
34	Kazimardi	L	IPM	Binjai	
35	JALIZ	L	IPM	Binjai	
36	Yaman M. Labian	L	IPM	Binjai	
37	Satria Harun	P	IPM	Binjai	
38	Alfians Zebidi	L	IPM	Binjai	
39	Alia Harun Butro	L	IPM	Binjai	
40	M. Sopia W	L	IPM	Binjai	
41	RICO J	L	DPM	Binjai	
42	Syamsudin	L	IPM	Binjai	
43	DEVIANA	L	IPM	Binjai	
44	TURPOLIS	L	IPM	Binjai	
45	M. Sopia W	L	DPM	Binjai	
46	ANASRUL	L	Korad	Binjai	

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Dion, Kaur Perencanaan Nagari Binjai, Rabu 21 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
47	Bahermani Key Badi	L	Tokoh Masyarakat	Rt. Sawah	47
48	Sarosa Jimal	L	Bamus	pd. Kudu	48
49	Nasir	L	Ka. Jorong	TP. Tinggi	49
50	Hil Mi	L	Ketua Ds. Ka	Kinahi	50
51	Syafrianto	L	paud	Bimbi	51
52	Wen Fitro	L	Masyarakat	PA. Nuban	52
53	Dibesman	L	ka. SD 22	Rt. Laka	53
54	Boy	L	Perangkat Nagari	Rt. Nungcong	54
55	Armani	P	K. Yesta	Lubuk Ruar	55
56	Rendrac	P	DP UPR	Lubuk Silakng	56
57	Rion Ramadan	L	DPUTR	Lb. Sikaping	57
58	Rosnidar	P	DPUTR	Lb. Sikaping	58
59	Wiga Wicahana	P	DPUTR	Lb. Sikaping	59
60	Jasman	L	Perangkat Nagari B	pd. sawah	60
61	Adyirdans	L	Kami R	pd. sawah	61
62					62
63					63
64					64
65					65

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2023

Dalam menetapkan kegiatan pembangunan di Nagari Binjai untuk Tahun 2022. Pada Hari Senin, 6 September 2021 diadakan Musrenbang tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) tahun 2022. Sebanyak 61 partisipan yang menghadiri Musrenbang Nagari Binjai pada saat itu. Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wali Nagari, Ketua Bumnag, Sekretaris Bumnag, Ketua PKK, Tim PKK Nagari Binjai, LPMN, Bamus, KAN, KPM (Kader Pembangunan Manusia), Kepala Jorong, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat, DPM, PLD (pendamping lokal desa), Perangkat Nagari, DPUTR, Guru Paud, dan Kepala Sekolah.

Gambar 1.6
Daftar Hadir Musrenbang Nagari Binjai Tahun 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	TANGGA TANDA
1	Christiana	L	Perencana	By. R. Sidi	
2	Fitri Eka	L	Perencana	By. R. Sidi	
3	ALI ANWAR	L	Pd. Sambi	Banjai	
4	MUSLIMAH	L	KORPRI	Perencana	
5	Nurhidayah	L	KORPRI	Pd. Sambi	
6	Pd. Sambi	L	Perencana		
7	Muslimah Sudi	L	Perencana	Perencana	
8	Alviani	L	Perencana	Perencana	
9	PUTRI LESTARI	L	Perencana	Perencana	
10	Desiana Adu	L	Perencana	Perencana	
11	Pd. Sambi	L	Perencana	Perencana	
12	YULI SEPDIANI	L	Perencana	Perencana	
13	Juwana	L	Perencana	Perencana	
14	Megawati	L	Perencana	Perencana	
15	ERANI PUTRI	L	Perencana	Perencana	
16	YULI SEPDIANI	L	Perencana	Perencana	
17	AGHA MELATI	L	Perencana	Perencana	
18	PUTRI HANUMAH	L	Perencana	Perencana	
19	Desi Nurhidayah	L	Perencana	Perencana	
20	ERANI PUTRI	L	Perencana	Perencana	
21	PUTRI LESTARI	L	Perencana	Perencana	
22	Ahmad Fauzan Fauzan	L	Perencana	Perencana	
23	NIOLA	P	Guru	Perencana	
24	R. Ninda Supriyati	P	Guru	Perencana	
25	ALAMSYATI	L	Perencana	Perencana	
26	MASAE	L	Perencana	Perencana	
27	Yusuf	L	Perencana	Perencana	
28	Sudirman	L	Perencana	Perencana	
29	Asimadani	L	Perencana	Perencana	
30	Pd. Sambi	L	Perencana	Perencana	
31	Baharudin M. J. M. J.	L	Perencana	Perencana	
32	Asman M. J. M. J.	L	Perencana	Perencana	
33	Perencana	L	Perencana	Perencana	
34	ALMADANI	P	Perencana	Perencana	
35	Pd. Sambi	L	Perencana	Perencana	
36	Perencana	L	Perencana	Perencana	
37	Perencana	L	Perencana	Perencana	
38	Perencana	L	Perencana	Perencana	
39	Perencana	L	Perencana	Perencana	
40	Perencana	L	Perencana	Perencana	
41	Perencana	L	Perencana	Perencana	
42	Perencana	L	Perencana	Perencana	
43	Perencana	L	Perencana	Perencana	
44	Perencana	L	Perencana	Perencana	
45	Perencana	L	Perencana	Perencana	
46	Perencana	L	Perencana	Perencana	
47	Perencana	L	Perencana	Perencana	
48	Perencana	L	Perencana	Perencana	
49	Perencana	L	Perencana	Perencana	
50	Perencana	L	Perencana	Perencana	
51	Perencana	L	Perencana	Perencana	
52	Perencana	L	Perencana	Perencana	
53	Perencana	L	Perencana	Perencana	
54	Perencana	L	Perencana	Perencana	
55	Perencana	L	Perencana	Perencana	
56	Perencana	L	Perencana	Perencana	
57	Perencana	L	Perencana	Perencana	
58	Perencana	L	Perencana	Perencana	
59	Perencana	L	Perencana	Perencana	
60	Perencana	L	Perencana	Perencana	
61	Perencana	L	Perencana	Perencana	
62	Perencana	L	Perencana	Perencana	
63	Perencana	L	Perencana	Perencana	
64	Perencana	L	Perencana	Perencana	
65	Perencana	L	Perencana	Perencana	
66	Perencana	L	Perencana	Perencana	
67	Perencana	L	Perencana	Perencana	
68	Perencana	L	Perencana	Perencana	
69	Perencana	L	Perencana	Perencana	
70	Perencana	L	Perencana	Perencana	
71	Perencana	L	Perencana	Perencana	
72	Perencana	L	Perencana	Perencana	
73	Perencana	L	Perencana	Perencana	
74	Perencana	L	Perencana	Perencana	
75	Perencana	L	Perencana	Perencana	
76	Perencana	L	Perencana	Perencana	
77	Perencana	L	Perencana	Perencana	
78	Perencana	L	Perencana	Perencana	

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2023

Pada Hari Senin, 2 September 2022 diadakan Musrenbang tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) tahun 2023. Sebanyak 73 partisipan yang menghadiri Musrenbang tersebut. Musrenbang tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat, Wali Nagari Binjai, Perangkat Nagari Binjai, Ketua Jorong,

Koor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), Kader Kesehatan, Formatig (Forum Masyarakat Tigo Nagari), LPM Nagari, Bamus Nagari, Babinsa, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Ketua Pemuda, Perangkat KUA, Bidan Desa, Kepala Sekolah, dan Guru Paud.

Dari jumlah daftar hadir di atas dapat kita lihat bahwa lebih dari 50 partisipan yang berpartisipasi dalam menghadiri pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari Binjai. Banyak tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan untuk menghadiri musrenbang Nagari Binjai. Dalam melihat partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari kehadiran masyarakat saat musrenbang, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, hingga evaluasi program kegiatan pembangunan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengetahui keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan pertanian di Nagari Binjai dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas. Pendekatan ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam konteks ini, efektivitas pembangunan dinilai dari tingkat keberhasilan hasil pembangunan dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat Nagari Binjai, bagaimana mutu dan kelancaran proses pelaksanaannya, serta seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada sektor pertanian.

Berdasarkan beberapa uraian yang ada di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh bentuk partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur jalan pertanian di Nagari Binjai Tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bentuk partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur jalan pertanian di Nagari Binjai Tahun 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian yang berjudul Pengaruh Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan Pertanian di Nagari Binjai Tahun 2022-2023 diharapkan dapat dijadikan bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah. Hal ini juga berkontribusi dalam memperkaya studi-studi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nagari atau desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi yang bermanfaat, serta menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang,

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.

